



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 12 Juli 2021

Halaman: 1

Ubah dari Dana Istimewa Jadi Dana Isoman

Paniradya: Danais Tidak Bisa Langsung Dibagikan ke Masyarakat

JOGJA, Radar Jogja - Pemprov DIJ memilih sikap menunggu terbitnya perubahan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait penggunaan dana keistimewaan (danais) DIJ untuk menangani Covid-19. Keluarnya surat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan (PK) Kementerian Keuangan (Kemkeu) terian Keuangan nomor S-121/PK/2021 tertanggal 10 Juli 2021, dinilai belum bisa menjadi pegangan bagi pemprov.

► *Baca Ubah... Hal 3*



34 KAMAR: Warga melintas di dekat Rusunawa Gemawang, Sleman.

Sifat	Tindak Lanjut
Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
Segera	☐ Untuk Diketahui
Biasa	☐ Jumpa Pers

Ubah dari Dana Istimewa Jadi Dana Isoman

Sambungan dari hal 1

"Kami tunggu dulu bunyi perubahan PMK. Dasar kami PMK. Tidak cukup hanya dengan surat edaran (SE) Ditjen PK," ujar Paniradya Kaistimewaan Artis Eko Nugroho saat dihubungi *Radar Jogja* kemarin (11/7).

Aris mengaku sudah mengecek keberadaan surat yang ditandatangani Dirjen PK Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti. Konfirmasi yang dia lakukan membenarkan adanya surat tersebut.

Surat yang ditujukan kepada gubernur DIJ melalui Sekprov DIJ berisi tentang penggunaan danais untuk penanganan Covid-19. Ada tiga hal yang di-

adalah dana dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Kedua, dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan pandemi Covid-19, dapat menggunakan danais. Penggunaan danais dilakukan melalui perubahan terhadap rencana penggunaan danais Tahun Anggaran (TA) 2021.

Ketiga, dasar hukum penggunaan danais untuk pencegahan dan/atau penanganan pandemi Covid-19 dilakukan melalui perubahan PMK nomor 17/PMK. 07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa TA 2021 dalam rangka men-

dukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Aris menegaskan, jika danais digunakan membantu masyarakat seperti bantuan sosial untuk isolasi mandiri (isoman) dan lainnya, mekanismenya harus melalui data terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS). "Tidak bisa langsung dibagi-bagikan ke masyarakat," katanya.

Dia menceritakan, danais pernah diplot untuk membantu para seniman di DIJ. Selama pandemi Covid-19, mereka ikut terdampak. Tidak bisa pentas. Bantuan sudah siap dikucurkan. Syaratnya penerima bantuan keterangan di KTP pekerjaan tercatat sebagai seniman. Namun saat akan dicairkan ter-

ganjal aturan. Penerima bantuan harus tercatat di DTKS.

Birokrat yang hobi bertani ini menambahkan, anggaran penanganan Covid-19 dari danais harus dipilah-pilah. Sepanjang belum tercover di APBD DIJ, maka danais bisa dimanfaatkan. Tapi ada catatannya. Selama regulasi mengizinkan," tegas alumni Institut Pertanian Stiper Jogja ini.

Berdasarkan pengalamannya pada TA 2020, perubahan PMK yang memungkinkan danais digunakan untuk penanganan Covid-19 harus tetap berbasis program dan kegiatan. Di luar itu, Aris merasa tidak yakin bisa dilakukan.

Mantan kepala Dinas Kebudayaan DIJ itu tersenyum saat mendengar beragam usulan soal

penggunaan danais menyusul keluarnya surat Dirjen PK Kementerian Keuangan. Di antaranya, ide Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIJ. Fraksi terbesar di dewan provinsi ini mengusulkan dibangun rumah sakit (RS) Darurat Covid-19 dengan menggunakan danais.

"Tolong ditanyakan dulu ke Dinas Kesehatan DIJ. Apakah itu memungkinkan," kata mantan Kabid Anggaran Belanja DPPKA DIJ itu.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIJ RB, Dwi Wahyu Budiantoro mendesak pemprov mengambil langkah inovatif menggunakan danais untuk menanggulangi Covid-19. Danais dapat digunakan mengatasi kekurangan fasilitas kesehatan. "Pemprov dapat memanfaatkan aset untuk membangun RS Darurat Covid-19 yang disertai perlengkapan kesehatan yang memadai," pintanya.

Danais juga dapat dipakai merekrut penambahan SDM tenaga kesehatan dan relawan. Selain itu, untuk membantu masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumah karena terpapar virus korona.

Selama ini isoman masih mengandalkan gotong royong warga atau tetangga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun obat-obat yang diperlukan.

Selangkan Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana berpendapat danais bisa untuk membeli mesin pembuat oksigen demi menjamin kelancaran pasokan oksigen. Juga meningkatkan kapasitas RS, memperbanyak selter, bantuan bagi warga miskin terdampak dan pedagang kecil.

Di samping itu, membantu mereka yang menjalani isoman di rumah. Dikatakan, sekarang semua sedang sulit. Karena itu, dibutuhkan gotong royong dan solidaritas pemerintah. Bentuknya dengan memaksimalkan anggaran apapun demi mengentaskan kesulitan dan penderitaan rakyat.

"Mem beli mesin oksigen terasa mahal. Namun tetap jauh lebih murah dibandingkan satu korban jiwa warga kita," ingat Huda memberi ilustrasi.

Dukung agar danais dapat digunakan membantu warga yang sedang menjalani isoman di rumah masing-masing juga disuarakan Kadiv Pengaduan Masyarakat Jogja Corruption Watch (JCW) Baharudin M. Kamba. Bahkan dia meminta selama pandemi Covid-19 ini, akronim danais sebaiknya diubah. "Disesuaikan dari dana istimewa menjadi dana isolasi atau dana isoman," katanya.

Dengan demikian, lanjut Bahar, danais benar-benar dapat di-

sakan manfaatnya oleh masyarakat DIJ. Sebagian besar rakyat sangat terdampak kehidupan sosial ekonominya selama menghadapi gelombang korona.

Terpisah, Ketua DPW PAN DIJ periode 2015-2020 Nazrudin mengungkapkan, selama ini tidak ada parameter atau aturan, yang jelas tentang penggunaan danais. Dasar pertimbangannya subjektif. Longgar. Bahkan pengategorian bisa diubah.

Tidak mengherankan danais bisa dipakai untuk membeli tanah, membeli hotel, membangun rumah susun dan jembatan serta membuat WC bawah tanah termahal di dunia. "Tergantung subjektivitas atau selera pemegang otoritas danais," sindir Nazar.

Kenyataan itu berbeda dengan penjelasan Sekprov DIJ Kadamanta Baskara Aji saat rapat kerja dengan pimpinan dan anggota dewan provinsi. Menurut Aji, penggunaan danais sudah dikunci oleh aturan.

"Tentu yang dimaksud dengan aturan di sini, penggunaan danais untuk melaksanakan lima bidang keistimewaan sebagaimana diamanatkan UUK. Praktiknya, nyaris saban tahun membeli tanah, membangun rumah susun, membeli hotel, berliburan atau membuat jembatan," ulangnya. (kus/laz/fj)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005